

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Kemajuan penggunaan teknologi di bidang informasi saat ini sangat berdampak pada kehidupan manusia, Dapat memperoleh pengetahuan dan mempermudah dalam memenuhi kebutuhan di bidang informasi (Yusuf, 2016). Teknologi informasi pada jaman sekarang berkembang dengan sangat pesat. Banyak perusahaan-perusahaan baik di mancanegara maupun di Indonesia sudah menggunakan teknologi informasi dalam menjalankan prosedur usahanya. Teknologi informasi mempunyai banyak keuntungan bagi penggunanya yaitu dapat mempermudah pekerjaan, selain itu dapat membantu dewan direksi untuk mengambil keputusan pada perusahaan tertentu serta dapat mengintergrasi seluruh bagian perusahaan.

Bidang pemerintahan pun kini telah mulai merasakan keuntungan yang diperoleh dengan memanfaatkan bantuan TI. Indonesia adalah salah satu negara yang juga ikut mengembangkan tata kelola TI untuk menghadapi era globalisasi atau modern yang semakin liberalis (Vinieta, 2016). Penerapan tata kelola Teknologi Informasi juga diterapkan di Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah kabupaten Tebo Jambi. Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah (SIMDA) ini merupakan suatu aplikasi terpadu yang digunakan sebagai alat bantu pemerintah daerah yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas

implementasi dari berbagai regulasi bidang pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan pada asas efisiensi, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel dan auditabel.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak terkait, semenjak tahun 2018 hingga pertengahan tahun 2021 ini belum dilakukannya tindakan untuk menilai pencapaian tingkat kapabilitas sistem informasi pengelolaan keuangan ini, sehingga masih adanya kendala seperti kurangnya pengawasan terhadap *software*, tidak valid data pada sistem, dan tidak adanya kebijakan dan prosedur tata kelola teknologi informasi secara utuh.

Dalam pelaksanaan penilaian tingkat kapabilitas ini, COBIT 5 digunakan sebagai *framework*. *Framework* COBIT 5 dipilih, karena *framework* COBIT 5 dapat diterapkan ke semua perusahaan dari segala ukuran. Tidak hanya itu, *framework* COBIT 5 sediakan rujukan model prosesi yang mewakili semua proses yang biasa di temukan dalam sesuatu industry terpaut dengan aktivitas Teknologi Data (Niza,2017). Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan proses-proses Teknologi Informasi dan pemenuhankepatuhan.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik mengambil judul penelitian inidengan judul **“IMPLEMENTASI *FRAMEWORK* COBIT 5 DALAM PENILAIAN TINGKAT KAPABILITAS SISTEM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PADA KANTOR BEKEUDA TEBO DI DUKUNG BAHASA PEMROGRAMAN PHP DAN DATABASE MY SQL”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah di dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana merancang sebuah system yang dapat mengukur tingkat kapabilitas sistem informasi pengelolaan keuangan daerah pada kantor BAKEUDA Tebo dengan menggunakan *Framework* COBIT 5.
2. Bagaimana melakukan evaluasi dalam penilaian tingkat kapabilitas sistem pengelolaan keuangan daerah pada kantor BAKEUDA Tebo dengan menggunakan *framework* COBIT 5.
3. Bagaimana dengan di implementasikannya *framework* COBIT 5 ini pada kantor BAKEUDA Tebo untuk membantu tanggung jawab karyawan dan pemangku kepentingan lainnya agar terkoordinasi dengan baik, sehingga proses pelaksanaan tugas dilaksanakan sesuai dengan yang tertulis di *job desk*.

## 1.3 Hipotesa

Dari permasalahan yang di kemukakan pada bagian terdahulu, maka dapat di kemukakan sebuah hipotesa. Hipotesa yang merupakan sebuah jawaban sementara dari suatu permasalahan. Adapun hipotesa dari permasalahan ini adalah :

1. Panduan yang digunakan saat menerapkan sumber daya teknologi informasi baru belum terbentuk, sehingga dapat menghambat sumber daya teknologi informasi pada kantor BAKEUDA Tebo.

2. Komunikasi peran dan tanggung jawab antar karyawan dan pemangku kepentingan lainnya belum terkoordinasi dengan baik. Diharapkan dengan adanya pengimplementasian *framework* COBIT 5 ini dapat membantu pelaksanaan tugas di kantor BAKEUDA Tebo menjadi lebih efektif dan efisien .
3. Pada proses pengelolaan inovasi, kantor BAKEUDA Tebo belum mendukung secara keseluruhan dalam hal menyerap ide-ide inovasi dari karyawan, dengan adanya implementasi ini diharapkan dapat meminimalisir permasalahan yang ada sehingga ide-ide baru bisa menjadi potensi untuk menciptakan inovasi teknologi.

#### **1.4 Batasan Masalah**

Agar tidak terjadi penyimpangan dalam laporan penelitian ini, sehubungan dengan keterbatasan yang dimiliki, baik dari segi waktu, pemikiran serta biaya, maka penelitian ini dibatasi. Adapun ruang lingkup masalah yang terdiri dari:

1. Kegiatan evaluasi dilakukan pada Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi.
2. Kegiatan evaluasi hanya fokus pada pelayanan percepatan penyusunan rencana kerja oleh Kabupaten Tebo Provinsi Jambi.
3. Penelitian ini menggunakan model kapabilitas pada *framework* COBIT 5 sebagai alat ukur terhadap jawaban responden dari kuesioner.

## **1.5 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah disebutkan, maka tujuan yang dikaji dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui gambaran kapabilitas bagaimana keadaan proses pengawasan teknologi saat ini (*as i*) dan kondisi yang diharapkan (*to be*) pada kantor BAKEUDA Tebo.
2. Mengetahui *gap* atau kesenjangan pada kantor BAKEUDA Tebo.
3. Memberikan rekomendasi sebagai usulan perbaikan agar segala mekanisme Manajemen Teknologi Informasi pada kantor BAKEUDA Tebo menjadi optimal sesuai dengan investasi yang dikeluarkan pada sistem informasi pengelolaan keuangan di Kabupaten Tebo.

## **1.6 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini terbagi tiga jenis manfaat, yaitu manfaat bagi mahasiswa, bagi universitas, dan bagi kantor BAKEUDA Tebo.

1. Bagi Mahasiswa
  - a. Menerapkan ilmu yang diperoleh selama kuliah.
  - b. Memahami kondisi di lapangan sebagai bahan pembelajaran sebelum terjun langsung di masyarakat.
  - c. Menambah pengetahuan terkait bidang ilmu yang diambil dalam penelitian.
2. Bagi Universitas
  - a. Mengetahui kemampuan mahasiswa dalam menerapkan ilmu pengetahuan

yang didapatnya selama kuliah.

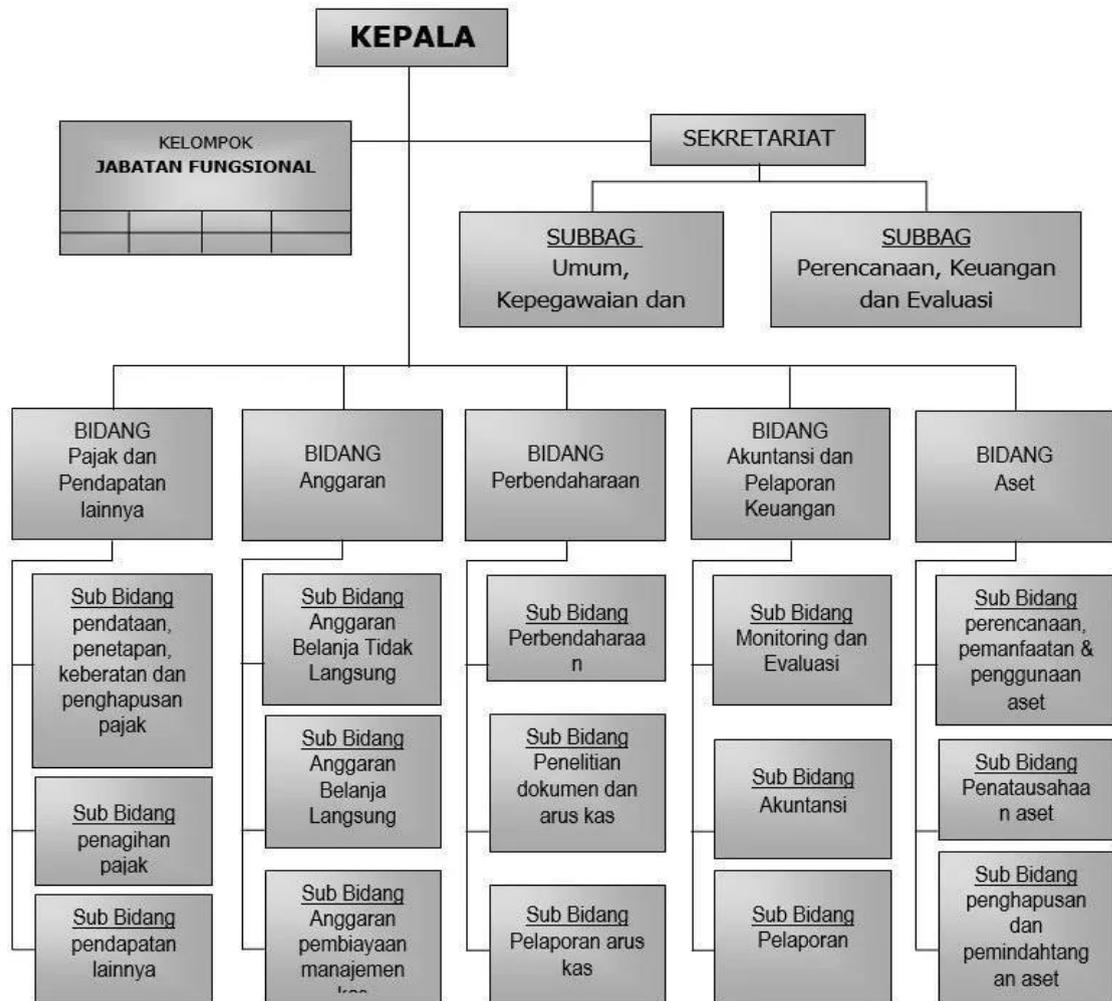
- b. Mengetahui kualitas mahasiswa dengan bidang penelitian yang diambilnya.
  - c. Menambah pengetahuan mengenai bidang kajian ilmu tertentu dari hasil penelitian mahasiswa.
3. Bagi Kantor BAKEUDA Tebo
- a. Kantor mengetahui kapabilitas untuk kondisi saat ini (*as is*) dan kondisi yang diharapkan (*to be*).
  - b. Kantor dapat mengetahui *gap* atau kesenjangan di dalamnya.
  - c. Menjadi referensi bagi penelitian-penelitian berikutnya dalam bidang yang dikaji oleh peneliti.

## **1.7 Tinjauan Objek Penelitian**

Tinjauan umum merupakan sebuah gambaran umum yang meliputi beberapa cakupan. Adapun beberapa cakupannya seperti sejarah berdirinya dan struktur organisasi tersebut. Disini penulis akan menjelaskan tentang gambaran umum perusahaan yang meliputi sejarah dan struktur organisasi.

### **1.7.1 Struktur Organisasi**

Adapun struktur organisasi pada Kantor BAKEUDA Tebo dapat terlihat pada gambar 1.1 sebagai berikut :



Sumber: Kantor BAKUDA Tebo

**Gambar 1.1 Struktur Organisasi Kantor BAKUDA Tebo**

### 1.7.2 Tugas dan Wewenang

Adapun tugas dan tanggung jawab masing-masing bagian nya adalah :

#### 1. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang merupakan unsur staf yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat mempunyai

tugas melakukan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Badan Keuangan Daerah. Untuk melaksanakan tugas dimaksud pada ayat Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rencana, program dan anggaran bidang keuangan .
- b. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ; ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip dan dokumentasi.
- c. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksanakan;
- d. Pengoordinasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan ;
- e. Pengelolaan barang milik daerah / kekayaan negara.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. BIDANG PAJAK DAN PENDAPATAN LAINNYA

Bidang pajak dan pendapatan lainnya dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas melakukan pembinaan, pengawasan, pendataan, dan penetapan pelaksanaan kegiatan penagihan pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaaan Perkotaamn (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan Perdesaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bidang Pajak dan pendapatan lainnya menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan program kerja/kegiatan Bidang Pajak Daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan pendapatan lainnya sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas.
- b. Pengoordinasian dan mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang tugasnya agar tugas dapat dilaksanakan dengan baik.
- c. Pemberiaan petunjuk kepada bawahan baik tertulis maupun lisan agar tugas dapat dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Pengoordinasian pelaksanaan pendaataan, penetapan, penagihan pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dana perimbangan dan pendataan lain-lain yang sah.
- e. Pembinaan terhadap penatausahaan administrasin penerimaan pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dan perimbangan dan pendataan lain-lain yang sah.
- f. Pelaksanaan koordinasi terhadap sumber-sumber pendapatan daerah instansi yang lebih tinggi dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana percepatam, hibah dan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk menyusun perencanaan dan pengembangan dan perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- g. Penerimaan, penelitian, pemeriksaan dan pemrosesan serta pengoordinasian penyelesaian pengajuan permohonan keberatan, banding dan keluhan masyarakat terhadap surat ketetapan pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
- h. Penyajian informasi pendapatan daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) secara tepat pada semua unit pelaksanaan secara terintegrasi.
- i. Penyiapan analisis terhadap sumber-sumber pendapatan daerah baik dari sector pajak daerah, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan Perkotaan (PBB-P2) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB), dana perimbangan dan pendapatan lain-lain yang sah.
- j. Pemeriksaan, pengoreksian dan pengevaluasian hasil kerja bawahan sebelum disampaikan kepada atasan.
- k. Pelaporan pelaksanaan kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan kepada pimpinan.
- l. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan Fungsinya.

### 3. BIDANG ANGGARAN

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang kepala bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan / atau kegiatan pengelolaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Bidang Anggaran menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan anggaran Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- b. Penyusunan program dan/atau kegiatan pendukung di bidang pengelolaan anggaran daerah.
- c. Pengoordinasian dan penyelenggaraan penyusunan anggaran dan administrasi anggaran daerah.
- d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan pengelolaan anggaran daerah.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang pengelolaan anggaran daerah.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4. BIDANG PERBENDAHARAAN

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan / atau kegiatan pelayanan perbendaharaan.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Bidang Perbendaharaan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis manajemen perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku.

- b. Penyusunan program dan / atau kegiatan pendukung di bidang manajemen perbendaharaan.
- c. Pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas perbendaharaan umum dan perbendaharaan gaji.
- d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas manajemen perbendaharaan.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang perbendaharaan.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 5. BIDANG AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN

Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan menyelenggarakan program dan / atau kegiatan akuntansi dan pelaporan pendapatan dan belanja daerah.

Untuk melaksanakan tugas-tugas yang dimaksud Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang akuntansi dan pelaporan pendapatan dan belanja daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan sesuai kebijakan Kepala Badan.
- b. Penyusunan Program dan / atau kegiatan pendukung di bidang akuntansi dan pelaporan.
- c. Pengoordinasian dan penyelenggaraan tugas akuntansi dan pelaporan pendapatan dan belanja daerah.

- d. Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas akuntansi dan pelaporan pendapatan dan belanja daerah.
- e. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja di bidang akuntansi dan pelaporan pendapatan dan belanja daerah.
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 6. BIDANG ASET

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok pembantu Kepala Badan dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan tentang pelaksanaan pengelolaan asset daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud Bidang Aset yang menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian pelaksanaan pengelola asset daerah.
- b. Pengoordinasian dan melakukan penghimpunan dalam rangkapanelaahan atas usulan rencana kebutuhan asset daerah dan rencana kebutuhan pemeliharaan asset daerah kepada pejabat pengelola asset daerah.
- c. Pengoordinasian penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan serta pengamanan asset daerah.
- d. Pengoordinasian pengaturan pemanfaatana dan penggunaan asset daerah.

- e. Pengeordinasian penetapan status penggunaan data penguasaan asset daerah.
- f. Pengeordinasian pengaturan penghapusan dan pemindahtanganan asset daerah.
- g. Pengeordinasian pelaksanaan penatausahaan, inventarisasi dan pengendalian asset daerah.
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

